



KR - Jarot Sarwosambodo

Peletakan batu pertama pembangunan gedung klinik PKU Muhammadiyah Kutoarjo.

Klinik PKU Muhammadiyah Ditargetkan Naik Tipe

PURWOREJO (KR) - PCM Muhammadiyah Kutoarjo mengembangkan Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kutoarjo dengan membangun gedung baru. Klinik tersebut ditargetkan akan menjadi Rumah Sakit (RS) Tipe D setelah bangunan yang rencananya berlantai empat itu kelak beroperasi. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Purworejo dan sejumlah tokoh masyarakat, Minggu (26/6).

Gedung baru itu adalah pengembangan dari bangunan klinik yang selama ini sudah beroperasi melayani masyarakat. Ketua PCM Muhammadiyah Kutoarjo Moh Mansur mengatakan, pembangunan tersebut merupakan langkah awal menuju terwujudnya RSU Tipe D PKU Muhammadiyah Kutoarjo. "Kami ingin lebih maksimal lagi melayani masyarakat yang tentunya bisa terwujud jika klinik utama ini naik menjadi RSU Tipe D," katanya, Senin (27/6).

Gedung baru itu dibangun di tanah seluas 3.400 meter persegi milik PCM yang letaknya di belakang klinik utama. Luas bangunan yang direncanakan adalah 800 meter persegi dengan konstruksi empat lantai. Bangunan baru itu memiliki kapasitas 50 tempat tidur pasien. PCM Muhammadiyah Kutoarjo bekerja sama dengan PCM Sruweng Kebumen, RS PKU Muhammadiyah Sruweng, dan tim teknis Veroes Yogyakarta. "Pembangunan diperkirakan selesai dalam 1 - 1,5 tahun," ujarnya. **(Jas)**

Bea Cukai Magelang Amankan Rokok Ilegal

MAGELANG (KR) - Wilayah kerja Kantor Bea Cukai Magelang, yang meliputi Kota dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, merupakan daerah lalu lintas rokok ilegal. Selama tahun 2022, telah dilaksanakan 30 kali kegiatan operasi penindakan rokok ilegal.

Demikian dikemukakan Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Heru Prayitno, Senin (27/6). Dalam kegiatan operasi penindakan rokok ilegal tersebut petugas berhasil mengamankan 536.773 batang rokok ilegal berbagai jenis senilai Rp 696.705.965 dengan potensi kerugian negara dari kewajiban cukai dan perpajakan lainnya mencapai Rp 469.886.018. Mengenai kegiatan Gempur Rokok Ilegal (GRI), bahwa Gempur Rokok Ilegal merupakan slogan dari Bea Cukai sebagai wujud komitmen dalam memberantas rokok ilegal yang diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penindakan.

Secara nasional, penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2021 sebesar Rp 188,81 triliun menyumbang hampir 10 persen penerimaan negara tahun 2021 yang mencapai Rp 2.003,1 triliun. Gempur Rokok Ilegal program nasional. Kantor Bea Cukai Magelang bekerjasama dengan organisasi pemerintah daerah di wilayah kerja melaksanakan kegiatan sosialisasi dan operasi pene-gakan hukum rokok ilegal.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Magelang, melalui UPT Sport Center, menjadi pelaksana kegiatan pentas musik yang bertempat di Sport Center Gelora Sanden dalam rangka sosialisasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal (GRI) Sabtu (25/6) malam lalu. Selain diwarnai acara talkshow dari Kantor Bea Cukai Magelang, malam itu juga ditampilkan beberapa grup musik. Penyanyi Damara De juga tampil dengan melantunkan beberapa lagu. **(Tha)**

ANGGOTA POLISI LAKUKAN PELANGGARAN

Sama Saja Pengkhianat Sumpah Janji



KR-Karyono

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmaf Luthfi memberikan arahan kepada anggota.

SEMARANG (KR) - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi berpesan pada seluruh personil untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjaga pola hidup sederhana. Kapolda juga meminta anggota untuk menjaga diri dari pelanggaran, terutama pelanggaran hukum. Pesan itu disampaikan Senin (27/6) saat memimpin apel pagi di halaman Mapolda Jateng. .

Menurut Ahmad Luthfi, sebagai manusia yang telah memilih polri sebagai profesi, setiap anggota Polri wajib memperkuat sense of belonging terhadap Polri dan menjaga marwah institusi. "Hidup kita pilihan dan kita telah memilih Polri sebagai jalan hidup, seluruh aspek kehidupan kita berafaskan Polri. Oleh karenanya jangan menodai koprshayangkara yang kita banggakan ini dengan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota Polri," tegasnya.

Ditegaskan, tidak ada anggota yang melakukan pelanggaran termasuk dengan dalih menegakkan hukum tapi melanggar hukum. Apabila ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran maka dia dianggap mengkhianati sumpah janji dan melanggar institusi. Tugas pokok Polri diantaranya menegakkan hukum, dan dalam mene-gakkan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum. Tugas pokok Polri secara jelas tercantum dalam pasal 13 UU No.22 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI. **(Cry)**

Guru Mengaji Terima Bantuan Kambing dari UIN Salatiga

TEMANGGUNG (KR)

Menyusuri jalan beraspal di tengah dusun sambil menyeret seekor kambing, Syukron (51) tersenyum. Warga Dusun Sanggrahan Desa Kemloko Kecamatan Kranggan Temanggung tersebut berencana akan mengembangkan kambing yang baru diperoleh dari UIN Salatiga, Senin (27/6).

Untuk mengembangkan kambing butuh waktu dan modal. Namun dengan keteguhan, kesabarannya dan ikhlar bukan tidak mungkin akan terlaksana. Waktu yang dimaksud, disampaikan Syukron yang kesehariannya ber-tani dan sebagai guru mengaji itu, karena kambing bantuan yang diterima ma-

sih anaknya atau cembe.

Kebutuhan modal sebab kambing butuh pasangan untuk dapat berkembang biak, sehingga harus membeli pasangan dari kambing yang didapatnya. "Masih ada waktu, yakni menunggu cembe besar, nanti sambil menabung untuk membeli pasangannya agar kawin dan bisa beranak," kata Muhammad Syukron, ditemui usai menerima bantuan seekor kambing. Dikatakan, ke depan juga akan mengembangkan peternakan rumah tangga seperti ayam kampung, sehingga meningkat perekonomian dan kesejahteraan rumah tangganya.

Guru mengaji lainnya Muhammad juga meneri-

ma bantuan kambing. Ada 54 ekor kambing yang diserahkan dari UIN Salatiga pada guru mengaji di Desa Kemloko. Desa tersebut menjadi salah satu desa binaan perguruan tinggi sebelumnya bernama IAIN Salatiga tersebut.



KR-Xaini Arrosyid

Guru mengaji mendapatkan bantuan domba untuk pemberdayaan ekonomi.

Soal Capres, Jangan Asal Beda dengan Jokowi

SEMARANG (KR) - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, calon presiden (capres) yang bakal menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempunyai komitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Andrinof Chaniago mengatakan hal ini di Semarang, Senin (27/6). Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden pada 2024 mendatang, publik akan mencari sosok capres yang tepat sebagai pengganti Jokowi. Sosok pengganti sekaliber Jokowi bukanlah orang sembarangan. Harus mempunyai kemampuan besar dan komitmen melanjutkan program-programnya, di antaranya IKN.

Andrinof yang juga pendiri Visi Indonesia 2033 memaparkan, hasil kerja Jokowi selama memimpin bangsa ini tidak terbantahkan. Sebut saja deretan infrastruktur selama enam tahun memimpin sejak 2014, yakni membangun jalan tol sepanjang 1.640 kilometer dan 4.600 kilometer jalan bukan tol. Selain itu, sejak 2014-2018 pemerintahan Jokowi juga telah membangun 949 embung,

dan manargetkan untuk menambah 61 embung lagi hingga 2024 diambkirk pemerintahanya. Hal ini agar produktivitas pertanian bisa lebih berkembang dengan pesat luas.

"Melihat kerja nyata Presiden Jokowi, rasanya sosok yang ingin menggantikannya harus mulai berkomitmen untuk meneruskan IKN. IKN tidak hanya sekadar mimpi, tetapi harus direalisasikan. Terlebih Undang-

Undang (UU) 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sudah diteken oleh Presiden Jokowi 15 Februari 2022,1 tutur Andrinof.

Menurut Andrinof, pembangunan IKN merupakan upaya pemerataan pembangunan dan demi keadilan. Itu yang selalu ditekankan oleh Presiden. Presiden berebicara seperti itu karena Indonesia memiliki 17 ribu pulau, tetapi 56 persen rakyatnya hidup di Pulau Jawa. Bahkan 58 persen persen perputaran ekonomi ada di Jawa, khususnya Jakarta. Untuk itu Presiden Jokowi berharap ada magnet lain yakni IKN.

Sayangnya dari sekian bakal capres yang disebutkan akan berlaga dalam Pilpres 2024 mendatang, sampai detik ini belum ada yang menyegel siap melanjutkan IKN. Padahal Jokowi sudah memberikan sinyal, jika IKN merupakan program yang benar-benar diinginkan. "Capres 2024 jangan asal beda dengan Jokowi. IKN adalah cita-cita Jokowi agar jadi episentrum pembangunan merata Jawa dan luar Jawa teralisasi. Kita dorong, ayo para capres sampaikan ke publik dan berkomitmen melanjutkan program IKN Jokowi," tuturnya. **(Bdi)**

Klaten Mulai Lakukan Vaksinasi PMK

KLATEN (KR) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten mulai Selasa (28/6) hingga Sabtu (2/7) akan melakukan vaksinasi PMK dengan alokasi sebanyak 2.200 dosis. Pencanangan vaksinAsi PMK akan dilakukan di Desa Sucokangsi, Kecamatan Jatinom, Klaten. "Kita rencanakan kegiatan pencanangan vaksinasi PMK di Desa Sucokangsi, Jatinom. Alokasi 2.200 dosis., tersebar di 13 kecamatan, 33 desa. Pemetaan desa dipercayakan pada tim medis, yang tahu posisi dan lokasi ternak yang sehat dan yang sakit. Hanya ternak sehat yang divaksin. Kita kerja doble, ada tim skrining dan tim vaksin,1 kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Widiyanti, Senin (27/6/2022). Widiyanti mengemukakan, tim skrining terdiri penyuluh pertanian lapangan, didampingi perangkat desa. Hal ini dalam rangka untuk pendataan dimana lokasi ternak yang sehat.

"Tim ada doternya, paramedik dan inumerator. Sebelum melakukan vaksinasi juga akan cek lagi kondisi kesehatan ternak. Jadi hasil skrining tak mutlak bisa divaksin, karena ada pengecekan ulang. Ini agak beebeda dengan vaksin korona. Vaksinasi ternak, selain sehat juga harus datang ke satu kandang ke kandang lain. Ternak tak bisa dikumpulkan di satu tempat,1 jelas Widiyanti. Sasaran vaksinasi, menurut Widiyanti, bisa sapi perah, sapi indukan, dan sapi yang memiliki masa hidup panjang seperti pedet. Sedangkan sapi-sapi yang akan dipotong tidak perlu divaksin. Selain itu, sapi yang sudah pernah kena PMK, atau dalam satu kandang sudah ada yang kena, juga tidak boleh divaksin. iKemungkinan besar sudah memapar ke sapi-sapi lainnya meskipun tak menunjukkan gejala klinis, jadi sudah akan membentuk antibodi di tubuhnya. **(Sit)**

SEMARANG (KR)

Program Studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas) mengadakan kegiatan pelatihan Table Manner yang diikuti 75 mahasiswa HI semester 4 dalam rangka implementasi mata kuliah Praktik Diplomasi di sebuah Hotel bintang 5 di Semarang, Kamis (23/6).

Daniel Fery dan Anna Yulia Hartati, S.IP, MA selaku instruktur dan pengajar dalam kegiatan ini serta Dr Hj. Ismiyatun MSI selaku Ketua Jurusan HI mengatakan mempelajari etiket di meja makan bukan sekedar mengetahui tata krama saat makan atau menggunakan alat makan. Menguasai table manner juga merupakan bentuk citra diri, bahkan profesionalisme seseorang. Pemahaman yang baik

seputar table manner bahkan memengaruhi kesiapan mahasiswa Hubungan Internasional yang umumnya selalu menghadiri event-event gala dinner internasional.

Dalam kegiatan gala dinner internasional tentunya pemilihan pakaian sangat penting bagi pencitraan seorang individu, oleh karena itu mahasiswa peserta Table Manner Course memakai pakaian

sipil lengkap untuk pria berjas dan untuk wanita menggunakan blazer dalam menghadiri pelatihan ini. Kemampuan bersosialisasi salah satunya juga ditunjukkan melalui etiket di meja makan. Table manner bicara banyak hal, termasuk etiket saat menghadiri jamuan makan, mulai dari kedatangan hingga waktunya meninggalkan jamuan makan. **(Sgi)**



KR-Istimewa

Tukar cinderamata Unwahas dan pihak hotel.

Jateng Membumikan Revitalisasi Bahasa Daerah

SEMARANG (KR) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menggalakkan revitalisasi bahasa daerah, setelah diluncurkannya Merdeka Belajar Episode ke-17. Jateng yang menjadi salah satu provinsi target revitalisasi, langsung mengambil langkah awal, menyelaraskan pemangku kebijakan terkait.

Digawangi Balai Bahasa Provinsi Jateng, penyelarasan dilakukan guna menyamakan persepsi tentang kebijakan revitalisasi bahasa daerah. Hal ini penting dilakukan agar program Merdeka Belajar lebih emembumi di masyarakat, dan program kerja antara pusat dan daerah dapat berjalan berkesinambungan. "Penyelarasan perlu dilakukan bersama, karena kepunahan ba-

hasa terjadi terutama karena para penuturnya tidak lagi menggunakan dan/atau mewariskan bahasa tersebut kepada generasi berikutnya," ungkap Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Kemendikbudristek, Iwa Lukmana dalam kunjungannya ke Provinsi Jateng, Jumat (24/6) dalam Rapat Koordinasi Pakar, Calon Pengajar, dan Pemerintah Daerah se-Propinsi Jateng.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, setiap elemen pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam strategi implementasi revitalisasi bahasa daerah. Ia menyebut, peran pemda dalam melestarikan bahasa daerah selama ini masih kurang. "Bukan hanya dari perhatian saja yang kurang, dari segi anggaran juga tidak ada," lanjut Ganjar. Disampaikan, bahwa melalui rakor ini, pihaknya mem-

fasilitasi para narasumber dan pakar yang akan dilibatkan menjadi pengajar/guru utama bahasa Jawa.

"Kita juga memfasilitasi para kepala dinas, para kepala bidang yang mena-ngani pengembangan dan pembinaan guru serta para pakar yang berkaitan langsung dengan pengajaran bahasa Jawa," urainya. Selain rapat koordinasi dengan pakar, calon pengajar, dan pemerintah daerah se-Propinsi Jawa Tengah, Balai Bahasa Provinsi

Jateng juga melakukan pelatihan kepada para guru utama Bahasa Jawa (training of trainer_guru utama) sebagai perwakilan dari setiap kabupaten/kota.

Program berikutnya, kata Ganjar, adalah Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) yaitu perlombaan dengan sasaran peserta didik dan tenaga pendidikan bahasa Jawa yang mengikuti pelatihan Training of Trainer (ToT) guru bahasa Jawa. iMelalui kegiatan ini diharapkan, perlindungan dan

pelestarian bahasa Jawa dapat berjalan berkesinambungan, berkelanjutan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemda, guru maupun budayawan,1 tuturnya.

Mengutip hasil penelitian di tahun 2011, Budayawan Jawa, KRAT Supardjo Dwijo Hadinagiri menyebut, penggunaan bahasa Jawa kala itu masih tinggi, yakni sekitar 73 juta penutur aktif. Akan tetapi, pada tahun 2019, penelitian menunjukkan bahwa penutur aktif Bahasa Jawa menurun cukup signifikan yakni menjadi sekitar 70 juta. "Walaupun bahasa Jawa banyak penggunaannya tapi kategori itu bisa dikatakan rawan, kritis untuk kehidupan ke depannya. Berangkat dari keprihatinan balai bahasa dalam memandang dan menyikapi perkembangan kehidupan bahasa Jawa yang sekarang ini sedang berlangsung," ujar Djiwo. **(Ati)**



KR-Istimewa

Para peserta Rapat Koordinasi Pakar, Calon Pengajart dan Pemerintah Daerah.